



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.012/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penagihan BPHTB





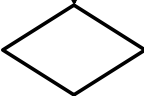
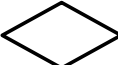
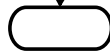
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Desa Di Wilayah Kabupaten Pangandaran.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Pajak Daerah.Memahami Tugas Dan Fungsi Bidang Pajak.Memahami Prosedur Penagihan BPHTB.Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Sekretaris.Kabid BPHTB.Kasubid Penetapan dan Penagihan.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Surat Penagihan BPHTB.Dokumen Pendukung.Komputer Set.Jaringan Internet.Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PENAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Wajib Pajak	Sekretaris	Kabid PBB-P2, BPHTB	Kasubid PBB-P2, BPHTB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun Rencana Penagihan BPHTB						1 hari		
2	Evaluasi dan Administrasi Pendapatan dengan Kabid PBB-P2, BPHTB terkait dengan Rencana Pengihan BPHTB					Bahan Penyusun Penagihan BPHTB	1 hari	Bahan penyusun	
3	Mengumpulkan data Wajib Pajak PBB-P2 terutang untuk dilakukan penagihan BPHTB					Data Wajib Pajak Terutang	1 hari	Data wajib pajak terutang	
4	Memerintahkan Kasubid PBB-P2, BPHTB untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak terutang					Surat teguran mengetahui Kepala Badan	7 Hari	Wajib pajak membayar pajak yang terutang	
5	Memerintahkan Kasubid PBB-P2, BPHTB memberikan surat paksa Kepada Wajib Pajak terutang apabila belum membayar Pajak BPHTB setelah diterbitkan surat teguran					Surat paksa mengetahui Kepala Badan	14 Hari	Wajib pajak melunasi pembayaran	
6	Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan					Surat Perintah melaksanakan penyitaan	14 Hari	Dokumen penyitaan	
7	Kepala Badan melaksanakan pengumuman lelang dan melaksanakan penjualan barang sitaan Wajib Pajak Melalui Kantor Lelang					Surat lelang	1 hari		
	Jumlah Waktu						39 Hari		